

MELACAK DINAMIKA SIPIL-MILITER PASCA REVOLUSI MESIR*

Atep A Rofiq¹

Permalink: <https://www.academia.edu/15117198>

Abstract: Tracking Civil-Military Dynamics after Egypt Revolution. Military revolution following Assisi's administration shows that democratization process in Egypt and Middle East Countries has not been so easy. Military infiltration has taken in place since 60 years ago. Thus, causing the difficulty to decrease its influence in Egypt. The Movement of Civil supremacy lead by the Mass Organization so called "Ikhwanul Muslimin" and the others opposition has not yet succeeded. This situation proved that Arab Spring has failed and the democratization in Middle East

Key Words: Military leadership, Egyptian Revolution and Arab Spring

Abstrak: Melacak Dinamika Sipil-Militer Pasca Revolusi Mesir. Revolusi Militer Kepemimpinan El-Sisi pasca Mesir memperkuat paradigma umum bahwa demokratisasi Mesir dan negara-negara Timur Tengah lainnya tidaklah mudah. Infiltrasi Militer terjadi sejak 60 tahun membuat kepemimpinan Mesir berakar dan sulit untuk menghapus dalam kepemimpinan Mesir. Supremasi sipil diperjuangkan Ikhwanul Muslimin dan pihak oposisi lainnya masih memerlukan waktu yang sangat lama dengan momentum politik berdarah. Situasi ini semakin menunjukkan bahwa Arab Spring telah gagal dan jalan demokratisasi di Timur Tengah mengalami kebuntuan.

Kata kunci: Kepemimpinan Militer, Revolusi Mesir, Arab Spring

* Diterima tanggal naskah diterima: 25 Maret 2015, direvisi: 26 Maret 2015, disetujui untuk terbit: 27 April 2015.

¹Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Jln. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel. E-mail: atep.abdurofiq@uinjkt.ac.id.

Pendahuluan

Kawasan Timur Tengah selalu diwarnai dengan berbagai pergolakan dan konflik, tidak mudah mengurai penyebab munculnya kekacauan di berbagai negara Arab yang penuh dengan kompleksitas. Turbulensi konflik telah menghambat pertumbuhan dan kemajuan negara-negara Arab dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Menurut George Leoczowski², konflik dan pergolakan di Timur Tengah secara geopolitik terjadi karena beberapa alasan, *pertama*, letak strategis kawasan timur tengah sebagai kawasan persimpangan (transit) dan lalu lintas perdagangan darat maupun laut, penghubung tiga benua Asia, Afrika dan Eropa, *kedua*, tingginya sumber daya alam dan kandungan ekonomi terutama minyak bumi yang terdapat disekitar kawasan Timur Tengah. Kedua alasan tersebut mendorong terjadinya berbagai konflik perbatasan darat dan laut, perebutan sumber air karena keterbatasan persediaan air, dan eksplorasi minyak bumi mentah yang merupakan manifestasi terbesar dari sumber daya alam yang dimiliki kawasan Timur Tengah.

Munculnya *Arab spring* pada akhir tahun 2010 yang diawali dengan keberhasilan **revolusi mawar** di Tunisia telah menyebarkan semangat perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah otoriter hampir di semua negara di Timur Tengah. Tema konflik telah bergeser dari perebutan wilayah dan identitas keyakinan Sunni dan Syiah serta perlawanan terhadap hegemoni barat menjadi perlawanan dan perebutan kekuasaan publik terhadap otoritarianisme disertai dengan munculnya kesadaran akan pentingnya demokratisasi kawasan Timur Tengah.

Kalangan yang optimis menganggap Revolusi *Arab Spring* merupakan prospek yang positif bagi penguatan regionalisme Timur Tengah dengan transisi pemerintahan dari otoriter menuju demokrasi yang mampu menjadikan negara-negara Arab menjadi lebih moderat. Pergolakan politik yang meluas ke negara Libya, Yaman, Mesir, dan Suriah telah menciptakan ketidakstabilan politik dan krisis yang luas. Konflik politik Libya dan Yaman tidak berlangsung lama dan menciptakan kerusakan yang massif, namun revolusi Mesir dan Suriah masih menyisakan konflik yang berkelanjutan hingga saat ini.

Peta politik timur tengah telah berubah, Iran mendukung rezim Assad di suriah, sedangkan negara-negara teluk menentang Assad. Pada saat yang sama Assad menentang Ikhwanul Muslimin sedangkan Ikhwanul Muslimin dan Amerika menentang rezim sementara Mesir

²Lihat George Leoczowski, *The Middle East In The World Affair*, (NewYork: TP, 1962), h. XXIII-XXV.

yang saat ini berada di bawah komando Jenderal As-sisi. Namun negara teluk minus Qatar, mendukung rezim as-Sisi. Ada dua sikap paradok negara-negara Timur Tengah, pertama, negara-negara Teluk bersetuju dengan Ikhwan di Suriah, tapi berseberangan secara ekstrim dengan Ikhwan dalam menyikapi Mesir. Kedua, Ikhwan sependapat dengan Iran, sedangkan di Suriah, Ikhwan berseberangan secara ekstrim dengan Iran. Keadaan ini tentu saja rentan dan berpotensi menimbulkan perang terbuka diantara negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah.

Penggulingan Mursi oleh Militer merupakan simbolisasi kegagalan demokratisasi di kawasan timur tengah. Keadaan ini semakin memperkuat asumsi bahwa politik timur tengah tidak bisa dilepaskan dari otoritarianisme militer, pemerintahan terpusat dan pemerintahan monarki. Kebuntuan demokratisasi Mesir justeru menciptakan paradigma negatif terhadap demokratisasi di kawasan Timur Tengah. Demokratisasi dianggap sebagai sumber dari berbagai konflik baru bagi kawasan Timur Tengah. Melacak perkembangan dinamika konflik sipil dan militer akan memberikan jawaban esensial terhadap kompatibilitas demokrasi di kawasan Timur Tengah khususnya Mesir.

Politik Militer di Mesir

Politik militer menjadi bagian paling penting dalam membaca relasi kekuasaan yang berkembang di Timur Tengah, selain dinamika politik Islam yang juga sering mewarnai diskursus konflik dan pergolakan politik Timur Tengah. Penetrasi militer kedalam lembaga-lembaga sipil merupakan kebijakan darurat untuk memperkuat lembaga-lembaga sipil dalam sistem negara. Politik sipil dianggap kurang mampu menciptakan stabilitas dan mendorong konflik-konflik yang kerap kali muncul dalam kepemimpinan sipil.

Samuel P Huntington³ mengelompokkan militer dalam dua kelompok yaitu, tentara pretorian dan tentara profesional. Tentara pretorian merupakan tentara yang berkuasa dan menjalankan pemerintahan serta menentukan keputusan-keputusan politik. Sedang tentara profesional menurutnya merupakan sekelompok tentara yang memiliki semangat pengabdian kepada negara untuk melindungi berbagai dinamika pemerintahan yang ada dan menjauhkan diri dari kepentingan politik. Tentara dengan kriteria ini memiliki tiga ciri pokok,

³ Lihat Samuel P. Huntington, *The Soldier and The State: The Theory and Politics Civil-military Relations*, Harvard University Press, Cambridge, 1957. Samuel P. Huntington adalah Profesor di Universitas Albert J. Weatherhead III dan pemimpin John M. Olin Institute for Strategic Studies di Universitas Harvard.

Atep A Rofiq

yaitu mensyaratkan keahlian, memiliki tanggung jawab yang khusus, serta karakter korporasi (*corporate character*) para perwira yang melahirkan rasa *esprit de corps* yang kuat. Ketiga ciri militer profesional di atas pada akhirnya melahirkan apa yang disebut Huntington sebagai "*The Military mind*" yang menjadi dasar hubungan militer dan negara dan penghargaan militer terhadap supremasi pemerintahan sipil.

Pandangan Huntington dikritik secara tajam oleh berbagai ilmuwan barat lainnya yang memiliki simpati terhadap keterlibatan politik kalangan militer. Edward Shils dan Lucian Pye⁴ memandang militer sebagai "*the modernizing elite*", militer merupakan organisasi elite paling modern dan efektif dalam menciptakan stabilitas politik, penetrasi militer merupakan konsekuensi logis dalam kawasan politik yang labil dan masih berkembang, karena negara berkembang membutuhkan stabilitas untuk menciptakan pembangunan negaranya.

Pretorianisme modern Menurut Amos Primutter⁵ terbagi atas 3 bentuk yaitu otokrasi militer, oligarki militer dan pretorianisme otoriter. Dalam otokrasi militer, pimpinan pemerintahan dipegang oleh seorang perwira tinggi. Dalam rejim ini, pemilu dihapuskan sedangkan dalam pemerintahan oligarki militer, pemerintahan dijalankan oleh beberapa orang, dimana eksekutif terdiri dari para perwira militer sedangkan eksekutif utama diduduki oleh pensiunan perwira militer atau orang sipil yang didukung militer secara penuh, rejim ini hanya bisa bertahan jika mendapat dukungan dari militer dan selalu melakukan mobilisasi dukungan. Rejim ini juga hanya kadang-kadang saja melakukan pemilu. Pada pretorianisme otoriter, pemerintahannya merupakan kombinasi sipil dan militer dengan kontrol yang sangat sedikit dan tidak ekstrim.

Kombinasi dari ketiga bentuk pemerintahan militer otoriterianisme, dimana tentara, birokrat, manajer dan teknokrat memainkan peranan yang penting. Birokrasi terdiri dari sipil dan militer sedangkan kepala pemerintahan bisa dari sipil murni. Dukungan rejim ini adalah lembaga militer, rejimini juga mengusahakan dukungan politik dari luar negeri. Pemilu diadakan dengan pembatasan-pembatasan dan masih bisa mentolelir adanya struktur politik nasional yang tidak mendukung rejim.

⁴Lihat artikel teoritis Edward Shills, "*The Military in the Political Development of the New States*", dan Lucian Pye, "*Armies in the Process of Political Modernization*".

⁵ Lihat Amos Perlmutter, *The Military and Politics and Modern Times: On Professionals, Praetorians and Revolutionary Soldiers*, Yale University Press, New Haven dan London, 1977, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Militer dan Politik*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal 297.

Dalam konteks politik Mesir, kekuatan politik dikuasai oleh dua kelompok besar yaitu kelompok militer yang menguasai relasi-relasi negara dan kelompok Islamis yang didominasi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin dan menguasai gerakan-gerakan sipil. Kedua kelompok ini saling berkonfrontasi dan menegasikan satu dengan yang lainnya. Konfrontasi ini telah menciptakan banyak korban baik dari kalangan militer maupun kalangan Ikhwanul Muslimin.

Infiltrasi militer sudah terjadi sejak 60 tahun kepemimpinan masyarakat Mesir. Sejarah politik Mesir diwarnai oleh kudeta militer, konflik politik antar militer serta konfrontasi terbuka kelompok militer dengan kelompok Islam Ikhwanul Muslimin. Jenderal Muhammad Naguib merupakan presiden dari kalangan militer pertama setelah penggulingan Raja Faruk yang tergabung dalam *Free Officers Group* yang dikomandoi oleh Kolonel Gamal Abdul Nasser. Kepenguasaan militer di pemerintahan Mesir kemudian diwujudkan dalam *Revolution Command Council* (RCC).

Kudeta yang dilakukan oleh Gamal Abdul Naser telah mereposisi kekuasaan dan menjadikan Gamal Abdul Naser presiden dari kalangan militer meski hanya memperbolehkan satu organisasi politik di Mesir yaitu *Arab Socialist Union*, di bawah kepemimpinan Nasser demokrasi mulai diperkenalkan di Mesir dalam bentuk monopartai dan masih kental dengan militer otoriterian.

Konflik internal antara militer menjadikan Anwar Sadat sebagai presiden setelah sebelumnya menjadi wakil presiden Jamal Abdul Naser. Naser diduga tewas diracun oleh Anwar Sadat pada sebuah prosesi jamuan makan. Sedangkan Husni Mubarak merupakan presiden dari kalangan militer setelah Anwar Sadat meninggal ditembak pada ruang terbuka dalam sebuah parade militer. Husni Mubarak merupakan pemimpin dari kelompok militer terlama dengan masa jabatan kurang lebih 30 tahun sampai akhirnya dilengserkan pada 11 Februari 2011.

Dalam perjalanan pemerintahannya, hampir seluruh pemimpin militer ini menggunakan sistem oligarki militer, dimana sipil ikut terlibat dalam pemerintahannya namun sebatas sebagai ornamen politik, pergantian kekuasaan terjadi melalui penggulingan dan dugaan rekayasa pembunuhan. Namun, pasca kepemimpinan Husni Mubarak pola pemerintahan bergeser menjadi pretorianisme otoriter, dimulainya pengakomodasian sipil dan pelaksanaan pemilu meskipun hanya dijadikan sebagai alat untuk memperpanjang legitimasi rezim otoriter. Pada awal masa pemerintahannya, Mubarak melibatkan militer secara penuh untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan memainkan peranan sebagai penjamin stabilitas domestik. Mubarak

Atep A Rofiq

menjadikan militer sebagai *the most powerful constituency*, dengan melibatkan militer dalam setiap proses pengambilan kebijakan sehingga Mubarak mendapatkan sokongan penuh dari kalangan militer dan mampu melanggengkan kekuasaannya selama kurang lebih 30 tahun.

Revolusi Mesir dan Penggulingan Militer

Revolusi mesir yang terjadi pada tahun 2011 merupakan gejolak politik yang paling fenomenal sepanjang sejarah *Arab spring*. Revolusi ini ditengarai oleh tuntutan sebagian rakyat mesir yang menginginkan Husni Mubarak turun dari tahta kepresidenan karena dianggap sudah tidak mampu lagi memimpin Mesir. Demonstrasi yang terjadi di Tahrir Square menewaskan setidaknya 10 demonstran dan 1500 orang yang terluka karena bentrokan antara pendukung presiden Husni Mubarak dan aparat keamanan.

Demonstrasi besar-besaran itu juga mengakibatkan terputusnya seluruh jaringan komunikasi yang terdapat di Mesir. Pemutusan jaringan komunikasi ini dilakukan oleh aparat pemerintah untuk memblokir arus lalu lintas komunikasi demonstran melalui telepon maupun internet. Penutupan bank-bank yang dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah antisipasi huru-hara telah mengakibatkan kerugian negara sebesar US\$310 juta perhari.

Husni Mubarak berhasil digulingkan karena penarikan dukungan militer terhadap rezim dan kekuasaannya. Ada beberapa hal yang dianggap menjadi alasan penarikan dukungan militer terhadap kepemimpinan Husni Mubarak pertama, meluasnya gelombang perlawanan sipil terhadap pemerintahan Husni Mubarak yang menyebabkan banyaknya korban yang berjatuh akibat demonstrasi besar-besaran yang dilakukan di *Tahrir Square*. Kedua, meluasnya krisis moneter dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat mesir, Keempat, terkuaknya indikasi korupsi yang dilakukan oleh Husni Mubarak beserta keluarganya, ketiga adanya pelemahan kekuatan militer yang dilakukan oleh Husni Mubarak pada akhir masa jabatannya dengan lebih menguatkan SS sebagai pasukan sipil yang bertugas menjaga keamanan domestik untuk memberangus para oposisi pemerintah.

Pasca digulingkannya Husni Mubarak pada tahun 2012, Dr. Muhammad Mursi terpilih menjadi presiden pertama Mesir secara demokratis mengalahkan Ahmad Syafiq, kandidat yang dianggap bagiandari rezim lama. Untuk pertama kalinya Ikhwanul Muslimin menduduki puncak kekuasaan Mesir dengan perolehan suara yang

maksimal setelah puluhan tahun hidup dalam tekanan rezim otoriter yang berkuasa.

Kekuasaan rezim revolusi berhasil membangun sentimen perlawanan terhadap hegemoni orang-orang lama yang masih bercokol di pemerintahan. Mursi bahkan sempat diapresiasi sumbangsihnya dalam memediasi konflik Israel-Hamas di Gaza. Legitimasi kepemimpinan sipil yang digawangi Muhammad Mursi hanya berlangsung 1 tahun, keadaan itu ditengarai karena munculnya dekrit presiden pada 22 November 2012. Dekrit itu muncul karena dua motif : (1) membentengi dewan konstituante dari mahkamah konstitusi dan lembaga yudikatif yang berisi orang-orang lama (2) mempercepat pembentukan konstitusi baru. Kondisi politik dan pemerintahan Mursi menjadi tidak stabil pasca munculnya friksi yang menajam antara kalangan Islam dan non Islam, bahkan pemerintahan Mursi dianggap gagal mengemban amanat revolusi.

Pada saat yang sama, relasi kekuasaan antara sipil dan militer menjadi semakin renggang. Dewan militer memberikan ultimatum agar Mursi segera turun dan menyelenggarakan pemilu kembali untuk menciptakan stabilitas namun akhirnya Mursi turun melalui kudeta militer dan menyisakan ribuan korban karena konflik antara sipil pendukung Mursi dengan kelompok militer. Paling tidak ada 4 alasan mengapa Mursi dikudeta oleh militer, *pertama*, Islamisasi konstitusi mesir, hal menimbulkan perlawanan dari kalangan pemuda sekuler at-tamarud yang berhasil momobilisasi massa untuk mendukung penurunan Mursi di *Tahrir Square*. *Kedua*, Pelengseran Jenderal Mohammed Tantawi yang pernah menjabat menteri pertahanan pada masa Husni Mubarak. *Ketiga*, Kegagalan pembangunan ekonomi mesir, *Keempat*, pengembangan kerjasama mesir dengan Iran dan Rusia yang notabene merupakan negara yang bertentangan secara ideologis dengan Amerika.

Babak Baru Hubungan Sipil dan Militer

Penggulingan Mursi oleh Jendral El-Sisi tidak lepas dari disharmonisasi hubungan sipil dan militer, kondisi ini tidak jauh berbeda berbagai pergumulan politik Mesir yang terjadi setelah kudeta militer yang terjadi pada raja Faruk. Kemenangan Jendral El-sisi memenangi pemilu ulang secara mutlak dengan perolehan suara 96.9% atau 23.38 juta pemilih memperkuat kembali pemerintahan militer di mesir dan mematahkan supremasi sipil.

Krisis politik Mesir yang memunculkan revolusi mesir hanya menjadi variable antara dan instrument politik peralihan dari rezim

Atep A Rofiq

mursi menuju rezim militer baru yang dipimpin oleh el-Sisi, meskipun langkah ini dikecam oleh berbagai negara-negara PBB dan negara demokratis lainnya seperti Amerika, namun el-sisi tetap tak bergeming dan menganggap sikap politiknya sebagai jalan terbaik untuk masa depan Mesir.

Gagalnya proses demokratisasi mesir melalui kudeta militer terhadap sipil semakin memperkuat bahwa masih sangat sulit menjauhkan militer dari negara dan menjadikan sipil dekat dengan kekuasaan. Atas dalih kepentingan stabilitas Mesir, kekuasaan militer akan menjadi protipe pemerintahan Mesir yang sulit untuk diubah.***

Pustaka Acuan

Drysdale Alasdair and Gerald Blake, *The Middle East and North Africa a PoliticalGeography*, New York; Oxford Press; 1985

Leoczowski, George , *The Middle East In The World Affair* ; NewYork; 1962

Huntington, Samuel P. *The Soldier and The State: The Theory and Politics Civil-military Relations*, Harvard University Press, Cambridge, 1957

Perlmutter, Amos *The Military and Politics and Modern Times: On Professionals, Praetorians and Revolutionary Soldiers*, Yale University Press, New Haven dan London, 1977, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Militer dan Politik*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2000

Edward Shills , “*The Military in the Political Development of the New States*”, dan Lucian Pye, “*Armies in the Process of Political Modernization*”, University of Chicago Press, Chicago, 1964.